

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya , M. M. (2015). Evaluasi Pemotongan dan Pemungutan atas Transaksi oleh Bendaharawan Pemerintah, Studi Kasus Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. *Doctoral dissertation*.
- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Alingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income Tax Evasion*.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of economic Literature*, 818-860.
- Andriana, N. (2019). KEPATUHAN BENDAHARA DESA DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF TEORI PLANNED BEHAVIOR. *JURNAL PAJAK INDONESIA*, 20-28.
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak. Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 195-217.
- Kasipillai, J., & Mohd, H. M. (2000). Tax professionals views on self assessment system. *Analisis* , 107-122.
- Kementerian Dalam Negeri (2014). Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata

Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau, dan DAK Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).

Mardiasmo. (2011). Perpajakan . *Andi*.

Nelwan, T. S. (2013). Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(3).

Pajak, D. J. (2016). *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Resmi. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. *Salemba Empat*.

Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4(1).

- Rustyaningsih, S. (2011). Faktor Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 44-45.
- Supadmi, N. L. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bendahara desa di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1-14.
- Susilawati, R. (2021). Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1).
- Tario, T., & Kusumawati, I. (2006). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assessment System. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 10(1).
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wardana, M. A., Burhan, I., & Akrim, D. (2021). ANALISIS PENERAPAN PAJAK ATAS DANA DESA DI DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU. *Jurnal Pabean: Perpajakan Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen*, 125-132.
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Bank Sulutgo di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4(1).
- Winata, I. K., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 545-554.